



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ISBAT NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al-Maslahah
Al-Mursalah)

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (A-AS)
Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon



Oleh :

MOH. MUNIF
NIM : 06310080

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON

2013 M / 1433 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

MOHAMMAD MUNIF: “*Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah)*”

Pencatatan pernikahan menjadi bukti otentik dari sebuah pernikahan agar terhindar dari penyelewengan dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan dicatatkannya suatu pernikahan maka sudah menjalankan amanat UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP No. 9 tahun 1975 tentang pernikahan. Dengan konsepsi al-maslahah al-mursalah pencatatan pernikahan akan semakin penting dilihat dari arti *Al-Maslahah Al-Mursalah* yaitu menarik kemaslahatan dan menolak *kemafsadatan* atau kerusakan, sehingga tercipta ketertiban dan melaksanakan amanat UU no.1 1974 Jo. PP no.9 tahun 1975.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang terkait dengan judul di atas yakni: 1. Apa yang dimaksud Isbat Nikah dan Al-Maslaha Al-Mursalah?; 2. Bagaimana Isbat Nikah ini dapat dilaksanakan menurut Kompilasi Hukum Islam?; 3. Bagaimana urgensi Isbat nikah dalam hukum di Indonesia?

Adapun penelitian ini bertujuan Untuk: 1. Memberikan gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang arti dan maksud isbat nikah dalam pasal 7 kompilasi hukum islam dan *Al-Maslaha Al-Mursalah*; 2. Mendefinisikan pernikahan yang dapat diajukan isbat nikahnya dalam KHI; 3. Mengetahui pentingnya *Isbat Nikah* dalam tatanan hukum islam di Indonesia.

Dikarenakan Penelitian ini menggunakan *Library reseach*, maka dalam pengumpulan datanya penulis banyak mengambil dari buku, tulisan serta hal-hal yang berkaitan dengan Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Sumber data yang dikumpulkan berupa data tertulis primer maupun sekunder yang kemudian dijadikan rujukan sebagai bahan-bahan penulisan sehingga didapatkan pemahaman yang luas.

Berdasarkan analisis pasal 7 kompilasi hukum Islam tentang isbat nikah dan perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*, dapat diambil kesimpulan Secara *implisit* KHI tidak memberikan definisi tentang *Isbat Nikah*, apabila ada pernikahan yang diisbatkan maka dengan konsepsi *Al-Maslahah Al-Mursalah* harus ditolak atau tidak dapat diterima. *Isbat Nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan: a)Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b)Hilangnya akta nikah; c)Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d)Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun1974; e)Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Pentingnya isbat nikah agar tertib administrasi seperti yang di amanatkan UU No.1 tahun 1974 Jo. PP No.9 tahun 1975 tentang pernikahan jadi pernikahan yang bisa di isbatkan hanya terbatas pada pernikahan yang di lakukan sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP No. 9 tahun 1975.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya, saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ISBAT NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PASAL 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH)”**, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis merasa sangat bahagia dan berterima kasih apabila semua pihak yang membaca skripsi ini dapat kiranya memberikan kritik dan saran yang dapat meningkatkan wawasan penulis.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, MA selaku rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Kholiq, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (A-AS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



4. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag selaku pembimbing I.
5. Bapak Dr. E. Sugianto, SH., MH selaku pembimbing II.
6. Segenap Dosen-dosen pengajar IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Akhir kata penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang melakukannya dan semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Amien

Cirebon, 10 Oktober 2012

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika penulisan	11
 BAB II ISBAT NIKAH DAN MASLAHAH MURSALAH	
A. Al-Maslahah Al-Mursalah Sebaagai Dalil Syar'i	13
B. Konsepsi Al-Maslahah Al-Mursalah.....	15
1. Masalahah Mu'tabarrah.....	19
2. Masalahah Mulgah	20
3. Masalahah Mursalah	21
 BAB III	
PENCATATAN PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH	
DALAM PASAL 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	
A. Kompilasi Hukum Islam	30
1. Pengertian KHI.....	30
2. Penyusunan KHI	32
3. Sumber-Sumber Penyusunan KHI	41
4. Tujuan KHI	43



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Pencatatan Perkawinan.....	50
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	50
2. Tujuan Pencatatan Perkawinan	50
3. Legalisasi Perkawinan.....	53
4. Prosedur Pencatatan Perkawinan.....	55
5. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	60
C. Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam	63
1. Pengertian Isbat Nikah	63
2. Ketentuan Isbat Nikah.....	65
3. Para Pihak Perkara Isbat Nikah.....	67

BAB IV ANALISIS TERHADAP PASAL 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

A. Analisis isbat nikah dalam aspek kemaslahatan.....	69
B. Analisis terhadap arti isbat nikah dalam klompilasi hukum islam	76
C. Pernikahan yang dapat diisbatkan sesuai pasal 7 kompilasi hukum islam	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*. perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum *Islam* dan sesuai dengan undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum islam.

Perkawinan sangat penting yaitu untuk memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan yang sah. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna yaitu memiliki akal (pikiran) dan perasaan (hati). Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.¹

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UUI, Cet ke-8, 1996. h. 1.



Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.² Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.³

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

² Nasarudin Salim, "*Isbat Nikah Dalam Kompilasi hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis)*", dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, no. 62 THN. XIV, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. 2004. h. 67.

³ *Ibid.* h. 69.

⁴ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI. 1996. h. 96.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat dan *maslahat* bagi diri dan keluarganya (istri dan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan *qadzaf zina* (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan akta nikah tersebut adalah sangat penting.

Hal ini berbeda dengan pemahaman tentang ketentuan perkawinan oleh sebagian masyarakat muslim yang lebih menekankan perspektif fiqh sentries.⁵ Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti dengan pencatatan perkawinan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan melakukan praktek nikah dibawah tangan.

Pada awalya perkawinana dibawah tangan yang dilakukan, adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat(1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁵ Ahmad Rofiq, *hukum islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4. 2000. h. 109.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Prinsip pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Jo. PP No.9 Tahun 1975 adalah untuk menjaga hak-hak bagi suami istri jika terjadi penyimpangan dalam perkawinan. Keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah dalam suatu perkawinan yang kapasitasnya sebagai pegawai atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas untuk mengawasi perkawinan dan mencatatnya. Dengan merujuk UU No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975, maka setiap perkawinan harus dicatat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan.

Mengenai isbat nikah yang terdapat dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam ini memang belum ada batasan tentang perkawinan yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat menimbulkan problem baru lagi, maka pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Bahwa yang dimaksud dengan adanya perkawinan yang terdapat dalam rumusan KHI tersebut adalah perkawinan yang terjadi setelah tanggal Oktober 1975, bukan perkawinan dibawah tangan atau poligami liar. Tapi karena ada suatu hal maka perkawinan itu tidak dicatat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Misalnya karena kelalaian oleh oknum P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) yang memanfaatkan ketidak tahuan calon mempelai, perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU perkawinan tetapi P3N tersebut tidak melaporkan ke PPN (Petugas Pencatat Nikah), sehingga perkawinan



tersebut tidak dicatat. Kemudian karena ada kepentingan dengan perkawinan itu (untuk mendapatkan akta nikah) suami istri tersebut atau pihak yang terkait baru mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dengan melihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa masalah isbat nikah tidak diatur dalam UU ini, tetapi mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi ketertiban dalam perkawinan. Tetapi KHI mengatur masalah isbat nikah dalam pasal 7. Tetapi penjelasan lebih lanjut tentang isbat nikah tidak ada, mulai dari pengertian sampai pada prosedur yang dijalankan dalam mengajukan perkara isbat nikah. Dari segi sosiologis dengan adanya pasal 7 KHI tentang isbat nikah akan memberi dampak kepada masyarakat untuk melakukan nikah dibawah tangan secara massif.⁶ Dengan demikian tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, maka hal ini akan menciptakan ketidak teraturan dalam pencatatan perkawinan. Dengan demikian bahwa rancunya ketentuan tentang isbat nikah yang ada dalam KHI perlu mendapatkan kajian yang lebih dalam.

Kemaslahatan yang di tuntutan oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan *syari'* tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil *syara'* tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat sesuai yang universal atau dalam istilah lain disebut *al*

⁶ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-3. 1990. h. 253



masalah al mursalah. Seperti kemaslahatan yang menuntut bahwa perkawinan yang tidak disertai bukti resmi, maka dakwaan adanya perkawinan itu tidak diterima ketika ada yang mengingkarinya. Semua itu adalah kemaslahatan yang oleh syari' belum ditetapkan hukumnya, dan juga tidak ada dalil tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.

Dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis membagi dalam tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

1.1. Wilayah penelitian

Wilayah penelitian ini adalah hukum acara peradilan agama

1.2. Pendekatan penulisan

Pendekatan penulisan pada skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normative.

1.3. Jenis masalah



Jenis masalah pada skripsi ini adalah Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah)

2. Pembatasan masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam masalah yang akan dibahas perlu kiranya diberi pembatasan yaitu: sekitar pembahasan Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah).

3. Pertanyaan masalah

1. Apa yang dimaksud Isbat Nikah dan Al-Maslaha Al-Mursalah?
2. Dalam hal pernikahan yang bagaimana Isbat Nikah ini dapat dilaksanakan menurut Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana urgensi Isbat nikah dalam hukum di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan studi ini adalah:

1. Untuk memberi gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang arti dan maksud isbat nikah dalam pasal 7 kompilasi hukum islam dan Al-Maslaha Al-Mursalah.
2. Untuk mengetahui pernikahan yang dapat diajukan isbat nikahnya.
3. Untuk mengetahui pentingnya Isbat Nikah dalam tatanan hukum islam di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Prinsip pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 adalah untuk menjaga hak-hak bagi suami istri jika terjadi penyimpangan dalam perkawinan. Keterlibatan pegawai pencatan nikah dalam suatu perkawinan yang kapasitasnya sebagai pegawai atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas untuk mengawasi perkawinan dan mencatatnya.

Dengan merujuk UU No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober Tahun 1974, maka setiap perkawinan harus dicatat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan.

Al-maslahah al-mursalah merupakan salah satu metode penggalan hukum islam yang dipopulerkan oleh Imam Maliki. Walaupun begitu, bukan berarti imam mazhab fiqh lainnya tidak sepakat dan tidak menggunakan metode *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penggalan hukum. Secara substansial, Imam Syafi'i, Hanafi dan Hanbali juga mengaplikasikan *al-maslahah al-mursalah* ini dalam penggalan hukum. Dalam penggunaan bahasa arab, kata *masalahah* sinonim dengan kata



manfaat dan antonim dengan kata mafsadah. Sedangkan pengertian bahasa secara umum masalah berarti menarik masalah dan menolak mafsadat.⁷

Dengan konsepsi al-maslahah al-mursalah pencatatan pernikahan akan semakin penting dilihat dari arti al-maslahah al-mursalah diatas yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan atau kerusakan, sehingga tercipta ketertiban dan melaksanakan amanat UU no.1 1974 Jo. PP no.9 tahun 1975.

Lembaga isbat nikah tidak semata-mata ditujukan sebagai upaya untuk ketertiban administrasi perkawinan, tapi juga untuk tegaknya hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan. Hakim Pengadilan Agama harus hati-hati dalam menangani masalah isbat nikah yang diajukan agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku perkawinan dibawah tangan dan poligami liar.⁸

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan atau Metode Penelitian

Metodologi adalah sesuatu yang sangat menentukan dalam setiap penelitian ataupun penulisan. Sebagai metodologi dalam kajian ini, penulis menggunakan studi pustaka (normatif).

2. Penentuan Jenis Data

⁷ Abdul, Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006. h. 261.

⁸ *Ibid.* h.88





Dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu mengenai isbat nikah dalam kompilasi hukum islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Sumber Data Primer*

yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Sumber data primer penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. *Sumber Data Sekunder*

Yaitu sumber-sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer di atas.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelaah teks dari referensi primer dan sekunder dari berbagai literatur.

5. Analisis Data

Sedangkan dalam menganalisis dan mengelola data, penulis menggunakan metode content analisis, yaitu metode yang membahas secara detail permasalahan yang sedang dibahas.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih terarah pembahasannya maka penulis menyusunnya kedalam sistematika yang terdiri dari lima bab, masing-masing membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Antara satu bab dengan bab lain saling berhubungan dan terkait.

Bab I: Pendahuluan.

Dalam bab ini meliputi: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Isbat nikah dan peencatatan pernikahan

Dalam bab ini meliputi : pengertian isbat nikah, syarat dan dasar hukum isbat nikah. Kemudian pengertian pencatatan perkawinan (legalisasi pernikahan), tujuan, prosedur pencatatan perkawinan dan dasar hukum pencatatan perkawinan.

Bab III: Isbat nikah dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam.



Meliputi pengertian KHI, penyusunan KHI, sumber-sumber penyusunan KHI dan tujuan dibentuknya KHI. Isbat nikah dalam KHI yang meliputi arti isbat nikah, ketentuan isbat nikah dalam KHI dan para pihak dalam perkara isbat nikah.

Bab IV: Analisis terhadap pasal 7 kompilasi hukum Islam tentang isbat nikah

Yang meliputi: analisis terhadap arti isbat nikah dalam pasal 7 KHI, analisis pernikahan yang dapat diisbatkan dalam pasal 7 KHI.

Bab V: Penutup.

Dalam bab ini meliputi: kesimpulan dan saran-saran.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Aen, Nurol dan Djazuli. 2000. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ali, Moh. Daud. 1990. *Ushul Fiqh, Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amrin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, Mukti H. A. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asyafri, Bakri. 1996. *Konsep maqhasid syari'ah menurut al-syatibi*, jakarta: Raja grafindo Persada.
- Basran, M. Masrani, dan Zaimi Dahlan. 1991 “Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam *Sudirman Teba, Perkembangan Metafisis Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Mizan.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UUI.
- Brata, Sumdi Surya. 1984 *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Bruenisien, Martin Van. 1995. *Kitab Kuning, di Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan.

Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, Jakarta: Amzah.

Daliyo, J.B. 1992. *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Agama RI. 1993. *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Intermasa.

Departemen Agama RI. 2000. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Djamaan, Nur. 1993. *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra.

Djalil, A. Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: kencana.

Efendi, Satria. 2001. "Analisis Fiqh", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam.

Gani, Abdullah abdul. 1991. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermasa.

Hadi, Sutrisno. 1998 *Metodologi Research, Jilid 2*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi.

Harahap, M. Yahya. 1998. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar.

Harahap, M. Yahya. 1992. "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5 Thn. III, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam.

Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Munawir, Ahmad Warison. 1984. *Kamus Al Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir.
- Nasruddin, Enas. 1997. "*Thwal Isbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan)*", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam.
- Nazir, Mohamad. 1996. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nuruddin, Amir Dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Permata Media.
- Prent, K.C.M. dkk. 1969. *Kamus Latin-Indonesia*, Semarang: Jajaran Kanisius.
- Ramulyo, M. Idris. 1985. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Mizan.
- Rasyid, Raihan A. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Rifa'i, Muh. Nasib. 1999. *Taisiru al Alliyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Riyadh: Maktabah Ma'arif*, 1989. Terjemahan, Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, Nasarudin. 2004. "*Isbat Nikah Dalam Kompilasi hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis)*", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, no. 62 THN. XIV, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta:

Pradnya Paramita.

Tim Penyusun Kamus, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wittermans. E. Pino. 1980. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Pratnya Paramita.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman. 1996. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al Ma'arif.

Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Ushul al-Fiqh, Terjemah Saefullah Ma'shum, Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zahid, Moh. 2002. *Dua Puluh Lima tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama R.I. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.